

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia bisnis kini menjadikan isu keberlanjutan (sustainability) sebagai agenda sentral. Komitmen global terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) menggerakkan korporasi besar untuk menyisipkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) pada strategi dan laporan mereka. Investor institusional, konsumen, dan publik semakin berharap perusahaan terbuka soal efek lingkungan dan sosial dari operasinya. Karena itu, banyak perusahaan menyusun sustainability report tahunan yang berisi informasi di luar angka keuangan.

Regulator di Indonesia ikut mempercepat penguatan pelaporan keberlanjutan. OJK telah merilis Roadmap Keuangan Berkelanjutan dan menetapkan kewajiban laporan keberlanjutan bagi perusahaan publik. POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik mengharuskan setiap emiten di BEI melaporkan kinerja ESG, entah di dalam laporan tahunan ataupun dalam dokumen terpisah. Aturan itu dipertegas lagi oleh SEOJK No.16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, yang menguraikan pengungkapan unsur ESG dengan rujukan standar global semacam Global Reporting Initiative (GRI). Arah tersebut seirama dengan perkembangan dunia, ketika International Sustainability Standards Board (ISSB) mengeluarkan IFRS S1 dan S2 yang menuntut pengungkapan tata kelola keberlanjutan, strategi, manajemen risiko, dan metrik keberlanjutan perusahaan.

Tersedianya laporan belum otomatis memenuhi tujuan keterbukaan itu. Agar informasinya benar-benar berguna bagi pemangku kepentingan, mutu laporan keberlanjutan perlu diperhatikan. Laporan yang baik semestinya relevan, menyeluruh, akurat, dan tidak bias, sehingga keputusan para pembacanya tepat. Banyak studi mengaitkan kualitas pelaporan keberlanjutan dengan mekanisme tata kelola perusahaan (Corporate Governance): perusahaan bertata kelola kuat diyakini lebih akuntabel dan lebih terbuka dalam melapor. Stakeholder Theory menyatakan perusahaan harus melayani kebutuhan informasi para stakeholders, sehingga struktur governance yang baik cenderung melahirkan pengungkapan yang lebih lengkap dan bermutu. Legitimacy Theory menguatkan pandangan ini, sebab perusahaan menjaga legitimasi sosialnya melalui pengungkapan yang bisa dipercaya, dan tata kelola yang baik pun terlihat pada laporan yang lebih kredibel.

Isu kualitas laporan keberlanjutan terkait langsung dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) United Nations, (2015). Melalui SDG 12.6, perusahaan didorong menyatukan informasi keberlanjutan ke dalam siklus pelaporan, sedangkan SDG 16.6 menuntut institusi yang akuntabel dan transparan. Kedua sasaran itu hanya tercapai jika laporan benar-benar kredibel, lengkap, dan mudah dipahami, bukan semata ada; laporan bermutu rendah tidak dapat dijadikan dasar bagi pemangku kepentingan untuk menilai kontribusi perusahaan pada SDGs, bahkan membuka celah *greenwashing* Delmas et al., (2011). Mutu pelaporan itu sendiri bertumpu pada pengawasan internal: dewan komisaris dan komite audit menjaga proses penyusunan serta keandalan informasi, sementara keberagaman gender dewan sejalan dengan SDG 5.5 tentang peran pemimpin perempuan dalam pengambilan keputusan United Nations, (2015). Atas dasar itu, penelitian ini memosisikan kualitas laporan keberlanjutan (SRQ) sebagai jembatan antara tata kelola perusahaan dan sumbangan korporasi bagi SDGs.

Banyak studi empiris sudah menelusuri kaitan antara Corporate Governance dan kualitas laporan keberlanjutan. Salah satu rujukan utamanya ialah studi Erin et al., (2022) di Nigeria, yang mendapati bahwa atribut board governance (ukuran dewan komisaris atau board size, keberagaman gender dewan atau board gender diversity, dan keahlian dewan atau board expertise) serta atribut komite audit (audit committee size, keahlian audit, dan frekuensi rapat) berkorelasi positif secara signifikan dengan kualitas laporan keberlanjutan. Bukti dari dalam negeri pun mendukung hal serupa. Saputra & Dewi, (2025) mengamati perusahaan nonkeuangan di BEI: komisaris independen dan komite audit terbukti berpengaruh positif signifikan, sedangkan ukuran dewan komisaris tidak. Dharmawan & Setiawan, (2024) menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan, tetapi peran dewan komisaris belum signifikan. Pada perusahaan manufaktur, Octora & Amin, (2023) menguji tata kelola dewan beserta tekanan pemangku kepentingan (stakeholder pressure) dan menemukan bahwa jumlah komisaris, proporsi komisaris independen, serta kehadiran perempuan di dewan sama-sama meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan. Sejalan dengan itu, Suharyani, (2019) memperlihatkan bahwa penerapan tata kelola yang makin baik secara keseluruhan menghasilkan laporan keberlanjutan yang makin baik.

Namun demikian, hasil studi terdahulu belum seragam. Harsono et al., (2024) dan Solikhah & Winarsih, (2016) mendapati bahwa hanya sebagian mekanisme tata kelola yang signifikan memengaruhi kualitas pengungkapan keberlanjutan, dan Sawitri & Ardhiani, (2023) malah menyimpulkan bahwa Corporate Governance secara agregat tidak signifikan memengaruhi kualitas laporan keberlanjutan. Selisih temuan ini memberi sinyal bahwa efek mekanisme governance terhadap SRQ bergantung pada konteks, indikator ukur, dan sampel yang dipakai; karena itu, penelitian tambahan pada perusahaan Indonesia masih layak dilakukan.

Dari situ muncul pertanyaan inti: mekanisme Corporate Governance mana yang sungguh memengaruhi kualitas laporan keberlanjutan perusahaan Indonesia? Sejauh mana ukuran dewan, proporsi komisaris independen, keberagaman gender, ukuran komite audit, keahlian dewan, keahlian keuangan komite audit, dan frekuensi rapat komite audit berperan terhadap Sustainability Reporting Quality (SRQ)? Pertanyaan ini mendesak karena riset di Indonesia yang secara menyeluruh menghubungkan tata kelola dengan kualitas pelaporan keberlanjutan, bukan hanya tingkat pengungkapan (disclosure index), jumlahnya masih terbatas. Kebanyakan studi terdahulu mengandalkan indikator pengungkapan yang bersifat kualitatif atau indeks sederhana, bukan ukuran kuantitatif yang menyeluruh atas mutu laporan.

Berangkat dari hal tersebut, studi ini menguji bagaimana mekanisme Corporate Governance memengaruhi kualitas laporan keberlanjutan pada perusahaan tercatat di BEI. Studi ini merupakan bagian kedua dari payung penelitian tim dan menjadikan Sustainability Reporting Quality (SRQ) sebagai variabel dependen. SRQ diukur dengan skala multidimensi (Loza Adau, 2020) berisi 23 indikator yang terbagi dalam tiga dimensi: kredibilitas, konten, dan komunikasi. Variabel tata kelola yang diteliti ialah Board Size, Board Independence (proporsi komisaris independen), Board Gender Diversity (proporsi perempuan di dewan komisaris), Audit Committee Size, Board Expertise, Audit Committee Financial Expertise, dan Audit Committee Meeting, dengan Firm Size, Profitability (ROA), dan Leverage sebagai pengendali. Datanya dianalisis memakai regresi data panel di EViews, dimulai dari memilih model estimasi terbaik dan menjalankan uji asumsi klasik agar model yang dihasilkan valid dan tidak bias.

Kontribusi penelitian ini ada dua sisi. Dari segi teori, hasilnya diharapkan menambah khazanah akuntansi keberlanjutan di Indonesia, terutama soal faktor penentu kualitas pelaporan nonkeuangan, serta menyempurnakan payung penelitian yang diawali pengukuran SRQ (Penelitian 1) dan dituntaskan lewat kajian peran assurance pada sustainable finance (Penelitian 3). Cakupan mekanisme Corporate Governance juga diperluas dengan tujuh proksi sekaligus, termasuk atribut yang lima tahun terakhir jarang diteliti, yakni Board Expertise, Audit Committee Financial Expertise, dan Audit Committee Meeting; hasilnya memberi potret determinan kualitas pelaporan keberlanjutan yang lebih utuh daripada studi sebelumnya yang biasanya hanya meninjau struktur dewan secara sederhana. Dari segi praktik, temuan ini diharapkan membantu manajemen merancang struktur dewan dan komite audit yang menunjang pelaporan keberlanjutan bermutu, menjadi bahan evaluasi regulator, serta menambah pertimbangan investor dalam menakar keandalan laporan keberlanjutan perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini ialah:

1. Apakah jumlah anggota Dewan Komisaris (Board Size) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan?
2. Apakah proporsi Komisaris Independen (Board Independence) berdampak signifikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan?
3. Apakah keberagaman gender Dewan Komisaris (Board Gender Diversity) berdampak signifikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan?
4. Apakah jumlah anggota Komite Audit (Audit Committee Size) berdampak signifikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan?
5. Apakah latar belakang keahlian anggota Dewan Komisaris (Board Expertise) berdampak signifikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan?
6. Apakah keahlian keuangan anggota Komite Audit (Audit Committee Financial Expertise) berdampak signifikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan?
7. Apakah frekuensi rapat Komite Audit (Audit Committee Meeting) berdampak signifikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dirumuskan tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Mengkaji pengaruh Board Size terhadap Sustainability Reporting Quality pada perusahaan tercatat di BEI.
2. Mengkaji pengaruh Board Independence terhadap Sustainability Reporting Quality.
3. Mengkaji pengaruh Board Gender Diversity terhadap Sustainability Reporting Quality.
4. Mengkaji pengaruh Audit Committee Size terhadap Sustainability Reporting Quality.
5. Mengkaji pengaruh Board Expertise terhadap Sustainability Reporting Quality.
6. Mengkaji pengaruh Audit Committee Financial Expertise terhadap Sustainability Reporting Quality.
7. Mengkaji pengaruh Audit Committee Meeting terhadap Sustainability Reporting Quality.

1.4. Kontribusi Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Dari sisi teori, penelitian ini diharapkan menunjukkan aspek tata kelola mana yang paling efektif mendongkrak kualitas pelaporan keberlanjutan, sehingga dapat dijadikan bagian dari strategi Good Corporate Governance (GCG), khususnya dalam hal susunan dewan dan fungsi komite audit.
2. Temuan penelitian dapat menjadi acuan belajar sekaligus bahan rujukan bagi peneliti lain yang menelaah topik yang sama.
3. Di bidang regulasi, temuan tentang dampak mekanisme GCG pada kualitas pelaporan dapat dipakai untuk mengevaluasi pelaksanaan aturan seperti POJK No.51/POJK.03/2017 dan SEOJK No.16/SEOJK.04/2021.
4. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan menyajikan bukti empiris tentang pentingnya aspek governance dalam menakar keandalan laporan keberlanjutan, yang bisa menjadi tambahan pertimbangan bagi investor dalam analisis investasi berkelanjutan.